

## **RELASI KUASA DESA WISATA BERKEMBANG DETUSOKO BARAT KABUPATEN ENDE NUSA TENGGARA TIMUR**

Maximianus Ardon Bidi<sup>1</sup>

Laila Kholid Alfridaus<sup>2</sup>

Dr. Drs. Muhammad Adnan<sup>3</sup>

*Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro<sup>1,2,3</sup>*

*Jalan Prof. Sudarto No.13, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275*

Alamat email koresponden: Ardonbidiundip05@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Development village tour is wrong one step strategic regarding activity social, cultural, and economy with utilise potency source owned power. Utilization potency tourist by no direct could create independence village with produce product and creation village for Fulfill his needs. So that for create a development process village optimal travel required strengthening of stakeholders in integration relation power, where each object power play role important To use support progress development based on approach with organization tourist and party related to the development process. This thing then Becomes ingredient study researcher about Relation Power Village Tour Develop West Detusoko, with results study showing that relation the power that happens in development process village tour showing existence integration dependency where for support the development process sector village tour besides fund a village with minimal resources help originated from formal institutions such as institutions in the area , other than that visible interaction in development process is powers that have interests.*

**Keywords :** *Relationship Power, Village Tour Develop*

### **ABSTRAK**

Pengembangan desa wisata adalah salah satu langkah strategis yang menyangkut kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemanfaatan potensi pariwisata secara tidak langsung dapat menciptakan kemandirian desa dengan dihasilkannya produk dan karya desa untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga untuk

menciptakan sebuah proses pengembangan desa wisata yang optimal diperlukan penguatan stakeholder dalam integrasi relasi kuasa, dimana masing-masing objek kuasa memainkan peran penting guna mendukung kemajuan pembangunan berdasarkan pendekatan dengan organisasi pariwisata dan pihak terkait yang mendukung proses pengembangan. Hal ini kemudian menjadi bahan kajian peneliti tentang Relasi Kuasa Desa Wisata Berkembang Detusoko Barat, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa yang terjadi dalam proses pengembangan desa wisata menunjukkan adanya integrasi ketergantungan dimana untuk mendukung proses pembangunan sektor wisata di desa selain dana desa yang minim sumber bantuan berasal dari lembaga formal seperti instansi yang ada di daerah, selain itu interaksi yang nampak dalam proses pengembangan adalah kuasa-kuasa yang memiliki kepentingan.

**Kata Kunci:** Relasi Kuasa, Desa Wisata Berkembang

## **PENDAHULUAN**

Politik dan pariwisata merupakan dua konsep saling berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan. Politik bisa diartikan dalam makna *politics* maupun *policy*. Makna *politics* menunjukkan pada interaksi kekuasaan dalam masyarakat, yang meliputi fenomena mempertahankan, memperbesar maupun merebut kekuasaan. Sedangkan *policy* mengarah pada serangkaian tindakan yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu yang dibuat oleh aktor yang berpengaruh atau berkuasa, atau biasa dikenal sebagai kebijakan (Gani, 1984). Dalam hal ini, keterkaitan politik dengan kepariwisataan adalah kegiatan seorang aktor, dalam setiap hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan, kebijakan, dan alokasi (Ala, 1985). Dapat di simpulkan bahwa politik pariwisata merupakan usaha atau cara yang di gunakan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) dengan menggunakan wewenangnya untuk membuat aturan yang dapat mempengaruhi serta menarik atau meningkatkan kunjungan wisatawan terhadap tempat wisata atau objek wisata.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan pariwisata adalah dengan mengadakan desa wisata. Menurut Charles Kaiser Jr. dan Larry E. Helber dalam (Sugiarti 2016) menciptakan desa wisata haruslah berdasar pada perencanaan pariwisata, dimulai dari pengembangan pariwisata daerah yang mencakup pembangunan fisik objek dan atraksi wisata. (Maharani, 2014) Hal ini menunjukan bahwa pembangunan fisik yang dilakukan bisa disesuaikan dengan potensi dimiliki suatu daerah. Adapun upaya mengembangkan potensi, perlu dilakukan pendekatan-pendekatan dengan organisasi pariwisata dan pihak-pihak terkait dalam mendukung kelanjutan pembangunan pariwisata daerah.

Pengembangan pariwisata dilakukan agar mendapat hasil maksimal sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat. Clare A. Gunn (1994) dalam bukunya menggambarkan skema proses pariwisata, di mana pengembangan pariwisata dilakukan oleh pembuat keputusan, terdiri dari pemerintah, masyarakat, organisasi mewakili masyarakat dalam hal ini kegiatan tidak mencari keuntungan demi dirinya sendiri, serta pengusaha. Pada bagian ini aktor-aktor tersebut saling bekerja sama dalam proses pengembangan pariwisata di wilayahnya. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari relasi antara para aktor dalam mencapai kekuasaan. Cronin mendefinisikan kekuasaan dipandang secara substansif/ tertanam dalam, dijalankan oleh, dan terhadap subjek menjadi konsep kekuasaan relasional sebagai suatu fungsi jaringan relasi antar subjek (Mudhoffir, 2013).

Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi, dimana ada relasi, disitu ada kekuasaan. Kuasa di deskripsikan oleh Foucault bukan sebagai kuasa untuk menguasai orang-orang secara fisik dan kediktatoran, melainkan kuasa dalam masa modern mengalami pola normalisasi yaitu kuasa disamarkan, disembunyikan dan diselubungi

sehingga terkesan tidak tampak. Kuasa dijalankan dengan membuat regulasi-regulasi yang dijalankan dan ditaati secara sukarela dalam sebuah organisasi, instansi maupun negara.

Relasi kuasa terjadi disebabkan oleh banyak hal, salah satunya melalui perbedaan kapital yang dimiliki antar individu. Pierre Bourdieu menjelaskan empat bentuk perbedaan kapital. Tidak hanya kapital ekonomi dalam makna kaku (seperti contoh bentuk kemakmuran, uang, kekayaan), namun juga kapital budaya (seperti keahlian, dan kepintaran), kapital sosial (jaringan, hubungan bisnis, hubungan sosial dalam masyarakat), dan juga kapital simbolik seperti kebanggaan, prestis. (Priyanto, 2017) Perbedaan kapital yang dimiliki oleh aktor tersebut menjadi latar belakang bagaimana relasi terbentuk. Hubungan yang disebabkan perbedaan kapital ini menimbulkan ketergantungan antara berbagai pihak, mulai dari pihak yang memegang kekuasaan dengan pihak yang menjadi objek kekuasaan. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat misalnya antara kelompok pemilik modal dan kelompok yang tidak memiliki modal. Terjadinya pola ketergantungan yang tidak seimbang mendatangkan sikap kepatuhan (Martin, 1995).

Berkaitan dengan Indonesia, sektor pariwisata menjadi salah satu sumber ekonomi yang penting. Pariwisata menjadi sumber devisa negara diurutan ketiga setelah komoditi minyak dan kelapa sawit. Pertumbuhan sektor pariwisata sangat pesat di Indonesia, memerlukan perhatian khusus terhadap potensi pariwisata baik dari pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah telah berusaha mengembangkan potensi pariwisata di Indonesia melalui kebijakan yang dibuat, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang

menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Kondisi geografis dikelilingi oleh empat kabupaten yaitu, kabupaten Nagekeo, Ngada, Sikka, Manggarai, Manggarai Barat dan kabupaten Flores Timur. Hal ini sangat menguntungkan bagi daerah kabupaten Ende dalam menggerakan aktivitas ekonomi daerah dalam kaitan pariwisata. Kabupaten Ende memiliki berbagai macam potensi wisata, di antaranya, wisata budaya dan kesenian, tarian tradisional suku Ende, suku Lio dan suku Nage sebagai tiga suku yang mendiami Kabupaten Ende. Adapun wisata alam, seperti Danau tiga warna atau Danau Kelimutu, dan wilayah konservasi habitat, Taman Nasional Pulau Komodo. Tempat wisata ini di kelola dengan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun aktor lain yang terlibat, sebagai upaya sumber pendapatan daerah Kabupaten Ende. Hal ini di maksukan sebagai kesiapan memberdayakan pemerintah dan masyarakat menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Banyaknya potensi pariwisata terdapat di Kabupaten Ende memberikan dampak positif tersendiri dalam hal Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Ende yang meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 1.** Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ende Tahun

Anggaran 2018-2020

<b>Uraian</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pendapatan asli daerah	61.247.211	80.000.000	93.783.783
Hasil Pajak Daerah	11. 191.676	26.979.030	15.432.811
Hasil Retribusi Daerah	4.008.757	6.185.733	15.432. 811

Sumber: BPS-RI, Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel di atas memaparkan Jumlah PAD Kabupaten Ende yang setiap tahunnya meningkat. Peningkatan ini secara tidak langsung berkaitan

dengan potensi wisata dimiliki oleh Kabupaten Ende mengingat Pemerintah provinsi NTT telah menetapkan pariwisata sebagai penggerak utama (*Prime Move*) pembangunan ekonomi di NTT melalui pendapatan asli daerah.

Adapun upaya memberdayakan menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global pemerintah Kabupaten Ende, melalui perda No 7 tahun 2016 pasal 55 adalah dengan penciptaan ruang pengolaan kawasan pariwisata, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata. Ide pembuatan Desa Wisata di dukung juga dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2012 tentang Kewenangan Lokal Tingkat Desa di mana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Hal ini menjadikan pemerintah desa menggunakan kewenangannya bersama masyarakat untuk mengembangkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Berkaitan dengan hal itu dikutip dari Victory News, desa –desa dalam wilayah Kabupaten Ende sering diikutsertakan dalam Perlombaan pariwisata desa baik dalam ajang lokal mau pun nasional, yang salah satunya desa Detusoko Barat. Desa detusoko barat menjadi salah satu desa, dan menjadi satu satu nya desa di Provinsi NTT terkhususnya Kabupaten Ende, terpilih sebagai pemenang ke 4 dalam ajang anugrah Desa Wisata 2021 kategori desa berkembang, dilaksanakan langsung oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia. Desa Detusoko adalah desa wisata alam dan budaya, memiliki topografi, lembah yang subur dan berbukit di sertakan dengan persawahan terasering dikelilingi langsung perbukitan hijau. Konsep wisata Detusoko diarahkan pada orginalitas, lokalitas, keaslian dan keunikkan khas *Flores, Living Like a locals, Be a Floreness*. Adapun jenis wisata yang disajikan, wisata agro;

susur sawah, explore kopi robusta khas Detusoko, jembatan Kali Loworia di tengah persawahan, kampung adat Suku Rini sebagai upaya pembelajaran menjadi orang flores, wisata kuliner dengan menikmati suguhan aneka menu lokal di Cafe Lepalio, wisata edukasi dan aneka tarian Adat dinisiasi oleh Pokdarwis Niraneni Desa Detusoko Barat melalui Sanggar Daudole. Adapun penjualan hasil alam dan ekonomi kreatif Desa Detusoko, di pasarkan melalui platform *e-commerce* di kelola langsung oleh BUMDES Desa Detusoko.

Seiring berjalannya waktu desa wisata Detusoko berbasis pada masyarakat memiliki masalah berkaitan dengan kepemimpinan. Hal ini di dasarkan prospek perkembangan Desa Detusoko Barat baru mengalami perubahan sejak di pimpin oleh kepala desa yang memiliki pengetahuan persoalan pariwisata. Tentu menjadi hal yang baik dalam proses pembangunan desa wisata, namun menjadi masalah apabila estafet semangat pengembangan desa wisata terhenti pada kepemimpinan saat ini atau ketidaksiapan akan perubahan otoritas. Mengingat pembangunan dengan prospek mengutamakan kekuatan rakyat dan komunitas lokal memiliki semangat ideologi populis. Populis sendiri menekankan bahwa di satu sisi mendorong masyarakat sipil mengembalikan kekuasaan kepada rakyat yang dianggap mewakili dan mampu memberi solutif pemecahan masyarakat . Namun di sisi lain, strategi ini bisa membahayakan kedaulatan rakyat itu sendiri, karena masyarakat tidak dapat menjangkau, manajemen ekonomi yang kacau akibat kuasa kelompok elit dan ketidakpatuhan terhadap konstituionalisme kedaulatan dalam masyarakat (Stavrakakis et al., 2016). Alhasil intervensi berlebih dari elit lokal dan kelompok kepentingan persoalan keputusan, seringkali tidak selaras dengan pengelolaan desa wisata dan kebutuhan penduduk lokal yang kerap kali terjadi pada pengembangan wisata di Kabupaten Ende

(Nistyantara 2011).

Hal ini menunjukan bahwa pengembangan desa wisata harus didasarkan pada pemahaman proses relasi kuasa di dalam nya. Guna mempertahankan dan mengembangkan keberadaan desa wisata tidak berhenti/ mengalami staknansi dan menjadi rujukan desa wisata lain di Kabupaten Ende. Oleh karena itu, relasi kuasa yang terjadi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, Bumdes, Pokwardis dan Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata menarik untuk diteliti.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai politik kontekstual khususnya pada Relasi Kuasa Desa Wisata Berkembang Detusoko Barat kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur Dalam hal ini, penelitian dilakukan untuk menjelaskan mengenai peran aktor yang terlibat dalam Desa Wisata Berkembang Detusoko Barat kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan tujuannya, maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme. Dalam hal ini, paradigma konstruktivisme melihat fenomena “realitas” sebagai produk dan penciptaan kognitif manusia (Berger & Luckman) dalam Hanitzsch (2011). Jenis dan sumber data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis melalui reduksi data penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **PEMBAHASAN**

### **Relasi Kuasa Internal Desa Wisata Detusoko Barat**

Konsep desentralisasi dalam dimensi pembangunan memiliki substansi pada pemberian kewenangan dalam bentuk delegasi secara

kusus pada tingkat Desa. Dalam hal ini konsep desentralisasi turut mendorong penciptaan kemandirian Desa yang didukung dengan alokasi dana Desa, tujuannya adalah kelembagaan tingkat desa mampu mengambil keputusan secara mandiri sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat lokal.

Perihal pembangunan tingkat lokal yang terjadi di Desa Detusoko Barat menunjukkan adanya upaya pembangunan yang sesuai dengan karakteristik lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sehingga pembangunan desa mengarah kepada sektor pariwisata berbasis masyarakat. Secara nampak untuk mendukung proses pengembangan desa wisata di Detusoko Barat menunjukkan adanya keterlibatan lembaga ditingkat desa berdasarkan peran dan fungsinya untuk mendukung penyelenggarahan pemerintah Desa perihal pembangunan.

Dalam menyelenggarakan pembangunan Desa wisata Detusoko Barat, Desa mendayagunakan lembaga-lembaga seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Sadar Wisata, Badan Usaha Milik Desa (BumDes Au Wula), Lembaga Masyarakat dan Lembaga Adat serta Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sebagai instansi tingkat daerah yang memiliki tugas dan fungsionalitas dalam urusan kepariwisataan. Masing-masing lembaga Desa ini memiliki kedudukan dan fungsi dalam konstruksi sehingga membentuk relasi dalam proses pengembangan Desa wisata.

### **Pemerintah Desa**

Berkedudukan sebagai unsur penyelengara pemerintah ditingkat desa, pemerintah desa memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan masyarakat dengan masing-masing unsur yang meliputi: kepala desa, sekretaris desa dan para kepala urusan, para kepala seksi dan unsur

pelaksana teritorial atau kepala dusun. Proses pengembangan desa wisata di Detusoko Barat dimulai dari tahun 2020 semenjak kepala desa (Ferdinandus Watu, S.Fil) menjabat sebagai kepala desa melalui perencanaan pembangunan jangka menengah desa dalam skala 6 tahun termasuk point pembangunan pada sektor pariwisata.

Keseluruhan visi misi kepala desa dituangkan dalam RPJMDES memuat sejumlah program kerja antara lain: menjadikan desa detusoko barat berkarakter lokal, berdaya saing, berbasis pertanian terpadu, ekowisata dengan mengedepankan teknologi dan informasi. Dalam mengembangkannya diturunkan dalam program tahunan yang disebut dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP) yang skalanya tiap tahun yang di implementasi melalui APBDes untuk penyusunanya dengan melakukan musyawara desa.

Konteks relasi kuasa yang terjadi di Detusoko Barat menggambarkan sebuah fenomena kuasa seperti yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu bahwa relasi kuasa disebabkan oleh perbedaan kapital salah satunya kapital budaya (keahlian dan kepintaran) dan kapital sosial (jaringan, hubungan bisnis, hubungan sosial dalam masyarakat). Dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah desa Detusoko Barat mampu mengembangkan potensi sumber daya alam sebagai sektor yang dimanfaatkan untuk pengembangan sektor wisata

Selain kapital budaya sebagai kekuatan pengembangan desa wisata, pemerintah Desa Detusoko Barat memiliki potensi pada sektor kapital sosial dengan dukungan jaringan maupun hubungan sosial. Bentuk jaringan dilakukan baik dengan kelompok dalam lingkup masyarakat desa maupun pihak lain, sehingga dalam proses pengembangan desa wisata Detusoko Barat banyak mendapatkan bantuan berupa anggaran dan prasarana pendukung desa wisata.

**Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Badan Permusyawaratan Desa Detusoko Barat sebagai lembaga sebagai lembaga pelaksanaan yang memiliki fungsi pemerintahan yang memiliki keanggotaan dari penduduk desa dengan kontribusinya dalam proses pengembangan desa wisata Detusoko Barat adalah bersama pemerintah desa membuat Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) selain itu BPD juga menjalankan fungsi legislasinya ditingkat Desa melakukan pengawasan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang wisata itu sendiri seperti apa, sehingga adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat itu bisa terjadi untuk pengembangan desa wisata. Munculnya konflik kepentingan dalam proses pengembangan desa wisata antara kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah desa, BPD turut mengambil peran mediasi dan penengah untuk menciptakan kondisi dalam sebuah persepsi persamaan kepentingan dengan kedudukannya yang independen dalam kelembagaan desa menurut Undan-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

**Kelompok sadar wisata (Pokdarwis)**

Eksistensi pokdarwis Nira Neni Desa Detusoko Barat dibentuk pada tahun 2021 mengambil peran dengan tugas pembantuan bersama pemerintah desa yaitu mengembangkan serta mengelola potensi kekayaan alam dan budaya di Desa Detusoko Barat yang memiliki lima potensi sumber daya yang dikelola untuk pengembangan wisata antara lain: atraksi wisata kopi, wisata panen padi, susur sawah, atraksi sanggar budaya, sensasi aneka kuliner, eksplor aneka produk oleh-oleh khas Detusoko Barat. Kepengurus pokdarwis Desa Detusoko Barat memiliki struktur kepengurusan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Detusoko Barat Nomor 26 Tahun 2021 Tentang pembentukan Kelompok

Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Detusoko Barat Kecamaatan Detusoko Kabupaten Ende

**Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa Detusoko Barat Au Wula adalah BUMDes yang dibentuk sejak tahun 2017 dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes diperuntukan untuk pembangunan usaha serta pembangunan desa. Kontribusi BUMDES dalam pengembangan desa wisata Detusoko Barat memiliki fokus pada penyediaan *home stay*, agrowisata, serta penawaran paket-paket wisata. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Au Wula memiliki tujuan pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa.

**Kelembagaan Adat Desa Detusoko Barat**

Keberadaan lembaga adat dalam proses pengembangan desa wisata Detusoko Barat menjadi sangat penting dengan mengambil peran melakukan pembinaan dan pengendalian tingkah laku masyarakat sesuai dengan ketentuan adat istiadat. Kelembagaan adat memiliki peran fundamental dan terintegrasi dalam struktur kemasyarakatan desa Detusoko Barat, dimana perbedaan kepentingan yang terjadi baik antara kelompok masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam pengembangan destinasi wisata, lembaga adat memiliki kontribusi sebagai penengah demi menciptakan persamaan persepsi kepentingan. Disamping itu struktur kelembagaan adat yang terdapat baik di Kabupaten Ende secara keseluruhan, khusunya Desa Detusoko barat adanya kedudukan tokoh tertinggi dalam masyarakat atau biasa yang disebut sebagai *Mosalaki* berasal dari kelompok feodal dengan segmentasi

bahwa keturunan orang-orang tersebut sebagai keturunan asli perihal kepemilikan atas tanah. Sehingga untuk mendukung kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan desa wisata Detusoko Barat kelembagaan adat desa Detusoko Barat memiliki peran dan fungsi sebagai berikut:

- Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan atraksi wisata
- Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya dan menjaga eksistensi adat istiadat sebagai salah satu daya tarik wisata
- Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam serta budaya desa Detusoko Barat untuk dipergunakan secara bijaksana.

**Dinas Pariwisata Kabupaten Ende**

Dalam mendukung proses pengembangan desa wisata detusoko barat, Dinas Pariwisata sebagai instansi terkait menggunakan tiga indikator yakni sebagai: koordinator, fasilitator, serta dinamisator. Dinas Pariwisata Kabupaten Ende terorganisir mengembangkan objek wisata dengan cara mempromosikan pariwisata desa detusoko barat, selain itu indikator Dinas Pariwisata sebagai fasilitator ditunjukan dengan dukungan dan distribusi nominal anggaran senilai Rp. 11.000.000. Disamping itu Dinas Pariwisata Kabupaten Ende memiliki juga memiliki peran penting dalam melakukan koordinasi terhadap potensi sumber daya di Desa Detusoko Barat sebagai salah satu potensi wisata yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pengelolaan obyek wisata di Desa Detusoko Barat, berfokus pada objek wisata lokal dengan pemanfaatan potensi wisata berasal dari sumber daya alam dan budaya yang disokong oleh infrastruktur

pendukung destinasi wisata. Sehingga untuk mendukung proses pengembangan desa wisata diperlukan kekuatan sumber daya manusia demi keberlanjutan pembangunan desa wisata Detusoko barat. Oleh karena itu untuk menjamin kualitas SDM kelembagaan desa dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende memberikan pelatihan salah satunya pelatihan digitalisasi marketing untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia dalam rangka mendukung promosi potensi pariwisata di Kabupaten Ende kususnya di Desa Detusoko Barat.

**Urgensi Terbentuknya Relasi Kuasa**

Sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan, pengembangan destinasi wisata menjadi bagian penting dalam urusan pemerintahan. Desa sebagai kelompok masyarakat akar rumput (grass root) memiliki kewenangan penuh mengatur dan mengurus rumah tangganya demi menciptakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya serta memajukan budaya. Pengembangan desa wisata tidak pernah terlepas dari upaya percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa karena itu tiap daerah dan desa perlu mencermati potensi yang dimiliki untuk diangkat dan dikembangkan agar memberikan nilai dan manfaat serta menghasilkan produkifitas yang tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Untuk mendukung proses pengembangan desa wisata, dukungan anggaran dan sumber daya lainnya menjadi faktor penting dan tidak dapat terpisahkan dari sebuah proses pembangunan. Anggaran menjadi stimulus dengan langkah konkret yang dilakukan adalah memberi porsi desa dalam pengembangan pariwisata dengan tren positif pariwisata dapat

di tangkap oleh pemerintah desa detusoko barat, dengan sumber anggaran yang diperoleh untuk mendukung proses pengembangan desa wisata cukup beragam seperti keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan pembangunan pada sektor pariwisata secara nampak dari kontribusi, bahwa masyarakat dikenakan beban tambahan untuk mendukung program pembangunan sebesar Rp. 150.000 dengan feedback yang didapat oleh masyarakat seperti bebas pajak, bebas air minum dan sebagainya. Langkah yang diambil oleh pemerintah desa sendiri tidak terlepas dari keterbatasan alokasi anggaran pada sektor pariwisata, sehingga demi menciptakan optimalisasi pembangunan desa wisata serta dengan kewenangan yang diperoleh pemerintah desa menciptakan kemandirian sehingga terjalinlah kuasa-kuasa diluar lingkup kelembagaan desa dengan kontribusi yang diberikan sebagai berikut.

No	Sumber Bantuan	Total
1	Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp. 380.000.000
2	Bantuan Sosial Provinsi	Rp 25.000.000
3	Kementerian Pariwisata	Rp. 10.000.000
4	Kemristekdikti melalui Universitas Flores	Rp. 100.000.000
5	Kemristekdikti (BRIN)	Rp. 200.000.000
7	UPPO Kementerian Pertanian	Rp. 200.000.000
8	Kemenakertrans	Rp. 25.000.000
9	Kemristekdikti (UKSW Salatiga)	Rp. 200.000.00
10	Bank NTT	Rp. 100.000.000
Total		Rp. 1.240.000.000

*Sumber: Profil Desa Detusoko Barat*

Tabel diatas menunjukan kontribusi dari stakeholder dalam mendukung proses pengembangan desa wisata. Kondisi ini secara tidak langsung mampu mencerminkan kemandirian desa, bahwa pemerintah desa melakukan upaya dengan mengedepankan optimalisasi potensi dirinya, dengan kuasa-kuasa yang terjadi dalam proses pengembangan

desa wisata adalah kewenangan pemerintah desa untuk memperkuat dan memberi dukungan energi dalam percepatan proses pembangunan. Kewenangan desa merupakan hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, selain itu dukungan keterlibatan kuasa terjadi karena keterbatasan anggaran dalam pembangunan desa wisata.

Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan sektor luar desa untuk mendukung proses pembangunan adalah dampak dari kewenangan di bidang penyelenggaran pemerintah desa dan pelaksanaan pembangunan desa, trend ini sebagai langkah strategis dalam upaya membangun kemandirian menuju kesejahteraan masyarakat desa.

### **Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pengembangan Desa Wisata Detusoko Barat**

Penggunaan dana desa memiliki tujuan dan peruntukan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kenaikan kualitas hidup dan pengendalian kemiskinan. Dana desa diutamakan untuk pendanaan dan penerapan program serta aktivitas bertaraf lokal berdasarkan perolehan sasaran RPJMDes dan RKPDes setiap tahun yang nampak dalam implementasi pendistribusian dana desa di Detusoko Barat yang dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi melalui pembangunan sektor pariwisata sekaligus mendorong perkembangan kewirausahaan lokal, serta mendorong peningkatan pendapatan asli desa. Dalam rangka pengembangan desa wisata diperlukan anggaran yang cukup besar sebagai akomodasi sarana prasarana pendukung desa wisata, sehingga dalam mengembangkan potensi wisata desa bisa menganggarkan kegiatan pengembangan desa wisata dalam APBDes.

Sebagai sumber pemasukan desa, dana desa merupakan sumber penghidupan dengan tujuan menciptakan kemandirian desa, meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa diputuskan melalui musrembang Desa. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tujuan pengalokasian dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya dana desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera sesuai tujuannya sebagai berikut.

- Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa
- Mendorong pembangunan infrastruktur perdesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal
- Meningkatkan pengaalan nilai-nilai keragaman, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- Mendorong peningkat keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.

Merujuk pemanfaatan dana desa sektor pariwisata di desa Detusoko barat pada awal implementasi pembangunan, pemerintah desa memiliki kekuatan anggaran sebesar Rp 40.000.000,00 dari alokasi dana desa secara keseluruhan. Dalam mengembangkan desa wisata tersebut pelaksanaan kegiatan dimulai dari Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

(RKP) dengan skala setiap tahun yang di implementasi melalui APBDes. Untuk penyusunanya dimulai dari musyawarah desa, hal ini secara tidak langsung mendorong terjadinya relasi kuasa di tingkat lokal antara pemerintah desa dan masyarakat dari sisi perencanaan dimana masyarakat terlibat dalam kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, program-program dan terlibat langsung dalam implementasi program sampai pada kegiatan evaluasi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Relasi Kuasa Desa Wisata Berkembang Detusoko Barat, maka peneliti dapat menyimpulkannya bahwa pengembangan Desa Wisata Detusoko Barat mendapatkan trend positif dukungan dari berbagai kalangan hal ini dibuktikan dengan keterlibatan kelembagaan desa seperti Pemerintah desa, kelompok sadar wisata, BUMDes, kelembagaan adat, masyarakat, pemerintah daerah sampai kepada pihak ketiga yang dibuktikan melalui distribusi sumber daya untuk mendukung proses pengembangan desa wisata.

Akan tetapi dalam proses pengembangan Desa Wisata Detusoko Barat memiliki hambatan seperti keterbatasan anggaran, sehingga situasi ini secara tidak langsung membuat pemerintah desa lebih mandiri dan inovatif serta berdampak pada terciptanya hubungan atau relasi kuasa antara pemerintah desa dan pihak lain yang turut mendukung pengembangan desa wisata Detusoko Barat berdasarkan skema proses pengembangan desa wisata Detusoko Barat perihal relasi kuasa merupakan manifestasi dari misi program pemerintah desa yaitu salah satunya membuka jaringan dengan berbagai LSM, BUMN/BUMD, lemagu pendidik, dan penelitian dalam mendukung aneka program pembangunan desa.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ala, A. B. (1985). *Hakekat Politik*. Yogyakarta: Akademika.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Kencana).
- Endraswara, S. (2006). *Metode Penelitian Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gani, S. I. (1984). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gunn, C. A. (1994). *Tourism Planning: Basics, Concepts, cases, 3 rd.* Washington, DC: Taylor & Francis.
- Hanitzsch, B. d. (2001). Teori Sistem Sosial dan Paradigma Konstruktivisme:Tantangan Keilmuan Jurnalistik di Era Informasi. *ejurnal.unsba.ac.id Vol.2 No.2*, 218.
- Harrison, L. (2007). *Metodelogi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana.
- Martin, R. (1995). *Sosiologi Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, L. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *jurnal sosiologi 18, no 1*, 78.
- Ningtyas, E. (2015). Pierre Bourdieu, Language And Symbolic Power. *jurnal poetika 3, no.2*, 155.
- Nistyantara, L. A. (2011). Strategi pengelolaan Taman Nasional Kelimutu melalui pendekatan CoManagement. *Tesis Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan.* (n.d.).
- Priyanto, J. (2017). Wacana, Kuasa dan Agama dalam Kontestasi Pilgub Jakarta Tinjauan Relasi Kuasa dan. *Jurnal Thaqafiyyat 18, no.2*, 191.

- Rani, D. P. (2014). Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang). *jurnal politik muda 3, no 3* , 414.
- Rara Sugiarti, I. A. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata di Kabupaten Ngawi. *cakra wisata 17, jilid 2*, 17.
- Stavrakakis, K. K. (n.d.). Kontemporer sayap kiri Populisme di Amerika Latin. *Latin Politik & Masyarakat Amerika*, 51-76.
- Tandilino, S. B. (2022). Penerapan Community Based Tourism Di Desa Wisata Lamalera Dalam Mendukung Pariwisata Estate Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Travel, Hospitality, Culture, Destination, And Mice, Vol 3 No 1* , 14-25.
- Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.* (n.d.). [hukum.unsrat.ac.id](http://hukum.unsrat.ac.id).
- Yin, R. K. (2002). *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.